



PANDU

Jurnal Pendidikan Anak dan Pendidikan Umum

Vol 2 No. 4 Bulan November Tahun 2024, pp. 16-30

E-ISSN : 2987-0739 | Email : pandu.kalimasadagrup@gmail.com

Website: <https://jurnal.kalimasadagrup.com/index.php/pandu>



KALIMASADA
group

PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA

Nurrona Abdi Ridhotullah¹, Nurminah², Mahfud Ifendi³

¹Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta

Email: ridhotullah04@gmail.com, nurminahmanik82@gmail.com, mahfudzifindi@gmail.com

Received: 26 September 2024 **Revised:** 25 Oktober 2024 **Accepted:** 1 November 2024

Published: 28 November 2024 **DOI:** 10.59966/pandu.v2i4.1380

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan kolonial, respons komunitas Muslim, serta dampaknya terhadap pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari sumber-sumber pustaka, termasuk buku, jurnal, dan dokumen sejarah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada masa ini menghadapi tantangan signifikan akibat kebijakan diskriminatif pemerintah kolonial, yang berusaha mengarahkan pendidikan untuk kepentingan administrasi kolonial. Meskipun demikian, pesantren tetap berfungsi sebagai benteng identitas keislaman dan tempat pengkaderan tokoh pergerakan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang sejarah pendidikan Islam dan menjadi referensi untuk pengembangan pendidikan Islam yang lebih inklusif di masa depan.

Kata kunci: Pendidikan Islam, penjajahan Belanda, pesantren, kebijakan kolonial, pergerakan nasional.

ABSTRACT

This research was conducted to explore the development of Islamic education during the Dutch colonial period in Indonesia, focusing on colonial policies, responses from the Muslim community, and their impact on Islamic education. The method used in this research is qualitative, with a literature study approach. Data were obtained from literary sources, including books, journals, and relevant historical documents. The findings indicate that Islamic education during this time faced significant challenges due to the discriminatory policies of the colonial government, which sought to direct education for the interests of colonial administration. Nevertheless, pesantren continued to serve as a bastion of Islamic identity and a place for nurturing national movement leaders. This research is expected to provide insights into the history of Islamic education and serve as a reference for the development of more inclusive Islamic education in the future.

Keywords: *Islamic education, Dutch colonialism, pesantren, colonial policies, national movement.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki akar sejarah yang panjang di Indonesia, yang keberadaannya erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Nusantara (Ya'kub & Rama, 2024). Sebagai bagian yang berperan dalam pembentukan karakter serta budaya rakyat Indonesia, pendidikan Islam telah memberikan kontribusi besar dalam membangun nilai-nilai spiritual, sosial, dan moral bangsa. Namun, keberlangsungan pendidikan Islam tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama selama masa penjajahan Belanda. (Maliki, 2023b) Masa ini merupakan salah satu periode paling krusial dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, di mana eksistensinya sering kali terancam oleh kebijakan kolonial yang diskriminatif (Susmihara, 2013).

Dengan kedatangan Belanda di Nusantara, banyak aspek kehidupan masyarakat diubah, termasuk pendidikan. Pada awalnya, Belanda tidak terlalu peduli terhadap sistem pendidikan

lokal, termasuk pendidikan Islam yang sudah berkembang di beberapa lembaga. Namun, semakin kuatnya cengkeraman kolonial, Belanda mulai mengarahkan perhatian mereka kepada pendidikan sebagai salah satu alat untuk mempertahankan kekuasaan (Afandi et al., 2020). Kebijakan pendidikan kolonial ini sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan pendidikan Islam, sehingga menciptakan ketegangan antara pemerintah kolonial dan komunitas Muslim. (Maliki, 2023a)

Salah satu bentuk intervensi kolonial yang signifikan adalah pendirian sekolah-sekolah pemerintah (*gouvernementscholen*) yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi. Sekolah-sekolah ini dirancang untuk membentuk tenaga kerja terdidik yang mampu mengelola administrasi kolonial, tetapi kurikulumnya sama sekali tidak memasukkan unsur pendidikan agama Islam (Ya'kub & Rama, 2024). Sebaliknya, pendidikan ini cenderung diarahkan untuk menanamkan ajaran Barat yang dianggap lebih "modern" dan "beradab." Sementara itu, pendidikan Islam yang berakar pada tradisi pesantren dan surau dianggap kuno dan tidak relevan dengan kebutuhan zaman menurut pandangan colonial (Tirolian, 2016).

Diskriminasi terhadap pendidikan Islam di Belanda tidak hanya terjadi pada kurikulum, tetapi juga dalam bentuk pembatasan akses terhadap pendidikan formal bagi umat Islam (Robi'ah et al., 2024). Mereka yang mampu membayar biaya sekolah yang sangat tinggi atau orang kaya seringkali memiliki akses eksklusif terhadap pendidikan di sekolah kolonial. Hal ini menyebabkan mayoritas masyarakat Muslim tetap bergantung pada pendidikan tradisional yang diselenggarakan oleh pesantren dan madrasah. Meskipun memiliki keterbatasan dari segi sarana, prasarana, dan kurikulum, lembaga-lembaga pendidikan Islam ini tetap menjadi benteng utama dalam menjaga identitas dan tradisi keislaman di tengah tekanan colonial (Slamet Untung, 2013).

Selain itu, perlawanan terhadap kebijakan pendidikan kolonial juga muncul dari para ulama dan tokoh-tokoh Islam. Mereka melihat pendidikan sebagai sarana penting untuk mempertahankan agama, budaya, dan identitas nasional (Eva Tri Cahyanti, 2021). Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, KH Ahmad Dahlan, dan HOS Tjokroaminoto menjadi figur sentral dalam upaya mereformasi pendidikan Islam agar tetap relevan dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan esensi keagamaannya. Gerakan pembaruan pendidikan Islam ini melahirkan lembaga-lembaga seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang berperan besar dalam mendirikan sekolah-sekolah berbasis Islam modern (Fikriyan et al., 2023).

Namun, upaya untuk mereformasi pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda tidaklah mudah. Selain menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial, para ulama dan aktivis pendidikan Islam juga harus berhadapan dengan tantangan internal, seperti resistensi dari sebagian komunitas Muslim yang masih berpegang pada tradisi lama (Syarifudin, 2021). Konflik antara kubu tradisional dan modernis dalam pendidikan Islam menjadi salah satu dinamika yang mewarnai perjuangan di masa itu (Transiska, 2021).

Di sisi lain, pendidikan Islam juga memiliki peran strategis dalam perjuangan melawan penjajahan (Muid et al., 2020). Madrasah dan pesantren Islam sebagai pusat pergerakan dan pengkaderan tokoh-tokoh perjuangan. Banyak ulama serta santri yang menjadi pemimpin perlawanan terhadap Belanda, baik melalui jalur politik maupun militer. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan karakter dan rasa jati diri bangsa sama pentingnya dalam pendidikan Islam masa kolonial sebagai mata pelajaran keilmuan. (Syarifuddin, 2017).

Pentingnya memahami pada masa penjajahan Belanda, dinamika pendidikan Islam terletak pada pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan pendidikan Islam di masa kini. Meskipun konteksnya berbeda, pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan, seperti modernisasi, globalisasi, dan sekularisasi. Dengan mempelajari sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan, kita dapat memahami strategi yang digunakan oleh para ulama atau tokoh-tokoh Islam dalam menghadapi tekanan dari dalam dan luar.

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi informasi secara komprehensif mengenai pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Oleh karena itu, tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman ilmiah tentang sejarah pendidikan Islam serta menjadi rujukan bagi upaya pengembangan pendidikan Islam yang lebih inklusif dan adaptif di masa depan.

Latar belakang ini menjelaskan bahwa pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda tidak hanya menjadi medan konflik antara tradisi lokal dan modernitas Barat, tetapi juga menjadi arena perjuangan untuk mempertahankan identitas keislaman dan kebangsaan. Melalui kajian ini, kita dapat memahami bagaimana pendidikan Islam memainkan peran strategis dalam membangun karakter bangsa dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang untuk terus menjaga dan mengembangkan tradisi keilmuan yang berbasis nilai-nilai Islam.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Studi yang mengkaji kehidupan dalam konteks masyarakat, sejarah, perilaku, operasional organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekeluargaan dikenal sebagai studi kualitatif (Salsabila et al., 2021). Jenis penelitian kualitatif ini dapat menghasilkan data deskriptif, yang biasanya diperoleh melalui aktivitas tertulis, lisan, dan observasi. dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian yang dilakukan di perpustakaan melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, terbitan berkala, dokumen, jurnal, dan buku sejarah. Kegiatan studi pustaka meliputi membaca, mencatat, mengumpulkan informasi perpustakaan, dan mengelola data penelitian secara obyektif, metodis, analitis, dan kritis sesuai dengan kebutuhan penulis. Metode pengumpulan data perpustakaan, membaca, mengevaluasi, mendokumentasikan, dan mengorganisasikan materi dari berbagai sumber literasi semuanya merupakan bagian dari studi literatur (Ya'kub & Rama, 2024). Temuan studi literatur ini akan digunakan untuk membantu menjelaskan bagaimana pendidikan Islam telah berkembang dari waktu ke waktu. Keadaan pendidikan Islam pada masa itu menjadi penekanan utama kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Peran dan Eksistensi Pesantren

Pesantren menjadi pusat utama penyebaran ajaran agama Islam di masa penjajahan Belanda (M.Rasyid et al., 2024). Sistem pendidikan di pesantren berorientasi pada pembelajaran kitab kuning dengan pendekatan tradisional. Meskipun pesantren sering dianggap terbelakang oleh pemerintah kolonial, lembaga ini menjadi benteng pertahanan nilai-nilai Islam di tengah arus sekularisasi yang diperkenalkan oleh Belanda. Pesantren juga berperan sebagai tempat pengkaderan tokoh-tokoh perjuangan, seperti KH Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang menyuarakan pentingnya menjaga tradisi Islam dalam menghadapi kolonialisme (Rohani et al., 2022)

Kebijakan Diskriminatif Kolonial

Pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah formal seperti *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) untuk anak pribumi yang diharapkan menjadi tenaga administrative (Hasan et al., 2023). Namun, kurikulum pendidikan ini tidak memasukkan unsur agama Islam, sehingga mendorong marginalisasi pendidikan Islam. Kebijakan ini juga membatasi pengaruh pesantren dan madrasah dengan regulasi ketat yang melarang pengajaran agama di luar ruang lingkup yang diawasi (Sumarno et al., 2019).

Gerakan Modernisasi

Pada awal abad ke-20, organisasi seperti Muhammadiyah (1912) dan Persatuan Islam (Persis, 1923) mulai memperkenalkan sistem pendidikan Islam yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan umum (Fitriani et al., 2024). Sekolah Muhammadiyah, misalnya, menjadi pelopor dalam memperluas cakupan pendidikan Islam agar relevan dengan kebutuhan zaman. Muhammadiyah menggunakan pendekatan modern, seperti penggunaan ruang kelas, kurikulum terpadu, dan metode pengajaran yang lebih sistematis. Ini menjadi alternatif bagi umat Islam yang mencari pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan nilai-nilai agama (Rohani et al., 2022)

Konflik antara Tradisionalis dan Modernis

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya gesekan internal dalam masyarakat Muslim (Nasution, 2022). Kelompok tradisionalis, yang mempertahankan metode pengajaran klasik di

pesantren, sering kali berseberangan dengan kelompok modernis yang mendorong reformasi pendidikan. Namun, konflik ini secara bertahap menjadi katalisator bagi pengembangan pendidikan Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan politik.

Kontribusi Pendidikan Islam Terhadap Pergerakan Nasional

Pendidikan Islam di masa penjajahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai media perlawanan terhadap kolonialisme (Abrisal et al., 2024). Banyak tokoh nasionalis dan pejuang kemerdekaan lahir dari pesantren dan madrasah. Pendidikan Islam membangun kesadaran kolektif di kalangan umat untuk mempertahankan identitas keislaman sekaligus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia (Rohani et al., 2022).

PEMBAHASAN

Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda menjadi salah satu aspek yang memainkan peran strategis dalam mempertahankan identitas keislaman masyarakat Nusantara (Amin, 2019). Pada era ini, pendidikan Islam menghadapi dua tantangan besar: kebijakan kolonial yang diskriminatif dan dinamika internal umat Islam.

Kondisi Pendidikan Pada Masa Penjajahan Belanda

Penaklukan barat atas timur dimulai dengan perdagangan. Begitu pula dengan Belanda yang datang ke Indonesia dengan tujuan mendirikan perusahaan dagang, khususnya untuk memperoleh rempah-rempah yang harganya mahal di Eropa. Namun karena kekayaan alam nusantara yang begitu melimpah, tujuan utama dialihkan untuk menguasai nusantara, memberikan pengaruh di sana, dan memperluas pengetahuan tentang nusantara. Ia terkenal dengan semboyan 3G: *Glory* (kekuasaan dan kemenangan), *Gold* (kekayaan bangsa Indonesia), dan *Gospel* (usaha menobatkan umat Islam di Indonesia). Belanda mendirikan sekolah-sekolah Kristen sebagai bagian dari upaya misionaris mereka. Misalnya, terdapat sekitar 20 sekolah di Batavia, dibandingkan dengan sekitar 30 sekolah di masa lalu, sementara terdapat 16 sekolah di Ambon dan 18 sekolah di seluruh kepulauan Ambon. Selain itu, sekolah-sekolah ini sekarang dapat diakses secara luas dan harganya terjangkau bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, Belanda memanfaatkan lembaga pendidikan tersebut untuk mempengaruhi daerah jajahannya (Nizar, 2005). Karena sekolah negeri Hindia Belanda didirikan dan dijalankan secara modern, terutama dari segi kelembagaan, kurikulum, metodologi, fasilitas, dan aspek lainnya, maka umat Islam menghadapi kendala dan persaingan yang sulit karena masyarakat umum mempunyai banyak kesempatan untuk mendaftar di sekolah tersebut. sekolah yang dikelola Belanda. Dalam upaya memajukan pendidikan Islam, para cendekiawan Islam telah mengembangkan solusi untuk mengatasi permasalahan ini sebagai respons terhadap pendirian sekolah yang cepat dan meluas (Rahman & Akbar, 2021). Mereka mendirikan lembaga pendidikan baik secara mandiri maupun dalam lembaga yang disebut madrasah atau sekolah.

Cornelis de Houtman memimpin Belanda ke Indonesia pertama kali pada tahun 1596, dan mereka berhasil menetap di Banten. Namun warga disana menolak kedatangan Belanda disebabkan sikap kasar dan angkuh mereka. Di bawah kepemimpinan Jacob van Heck, Belanda kembali ke Indonesia pada tahun 1598 (Syakur & Yusuf, 2020).

Belanda membawa kemajuan teknologi, namun tujuan mereka adalah untuk meningkatkan kinerja kolonial daripada kemakmuran negara yang dijajah. Mereka juga membawa sistem dan metode pendidikan baru, namun hanya untuk menciptakan pekerja yang bisa mendukung kepentingan mereka dengan upah rendah dibandingkan jika mereka harus mengimpor listrik dari barat. Westernisasi dan Kristenisasi, atau kepentingan Barat dan Kristen, inilah yang disebut dengan reformasi pendidikan; kedua faktor ini telah mempengaruhi kebijakan Belanda selama sekitar tiga setengah abad (Aiwan & Rehani, 2022).

Pada tahun 1819 M, Gubernur Jenderal Van den Capellen berinisiatif membantu pemerintah Belanda dengan menyelenggarakan pembangunan sekolah dasar bagi penduduk pribumi. Dalam surat edarannya kepada Bupati, ia menulis: "Dianggap penting untuk secepatnya melaksanakan peraturan pemerintah yang menjamin pemerataan kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk asli agar lebih mudah menaati peraturan perundang-undangan negara". Semangat surat edaran di atas menjelaskan mengapa sekolah dasar didirikan pada saat itu.

Pemerintah Belanda tidak percaya bahwa pengajaran agama Islam di tempat-tempat seperti masjid, musala, dan pesantren bermanfaat. Dalam bahasa Latin, santri di pesantren masih dianggap belum mampu. Dengan demikian, jelas bahwa pesantren dan madrasah dipandang tidak ada layanannya. Selain itu, karena kualitasnya yang rendah, sekolah adat disebut sebagai sekolah desa dan dimaksudkan untuk bersaing dengan madrasah dan pesantren desa (Syakur & Yusuf, 2020).

Ketakutan, rasa panggilan beragama, dan rasa kolonialisme menjadi landasan kebijakan pemerintah Belanda terhadap masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Pemerintah memberlakukan aturan yang lebih ketat terhadap pengajaran agama Islam pada tahun 1925 M, dengan menyatakan bahwa tidak semua kyai diperbolehkan mengajar mata pelajaran Al-Quran. Keberadaan gerakan organisasi pendidikan Islam yang tampak semakin berkembang, antara lain Muhammadiyah, Partai Islam, Al-Irsyad, dan lainnya, mungkin menjadi penyebab aturan tersebut (Ilham et al., 2023).

Ordonansi sekolah liar (*wilde school ordonantie*), yang diadopsi pada tahun 1932, memiliki kewenangan untuk menghilangkan dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin atau mengajarkan mata pelajaran yang tidak disetujui oleh pemerintah. Berkedok ikrar pemuda, undang-undang ini diundangkan menyusul bangkitnya gerakan nasionalisme-Islamisme pada tahun 1982 Masehi (Septiani, 2021).

Para ulama dan kyai tidak membantu Belanda, dan semangat Islam tetap dijunjung tinggi. Mereka meninggalkan daerah-daerah yang dekat dengan Belanda. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, “siapa yang menyerupai suatu kelompok maka dia termasuk dalam kelompok itu” (HR. Abu Dawud dan Imam Hibban), mereka melarang kebudayaan yang diperkenalkan Belanda. Mereka tetap mentaati surat Al-Maidah ayat 51 yang berbunyi, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin (kamu).”

Pada masa penjajahan Belanda, beberapa tokoh yang terkenal dan penting yaitu :

1. KH. Agus Salim

Seorang tokoh yang terkenal dengan latar belakang pendidikan yang kuat adalah KH. Agus Salim. *Europeesche Lagere School* (ELS) adalah tempat ia menerima pendidikan dasar. ELS adalah sekolah unik untuk anak-anak dari Eropa (Sultani & Kristanti, 2020). Setelah itu, Agus Salim bersekolah di *Hoogere Burgerschool* (HBS) Batavia untuk menyelesaikan studinya. Pada tahun 1903, beliau menjadi lulusan terbaik di HBS Hindia Belanda berkat kecerdasannya. Berikut peranan KH. Agus Salim dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia:

1. Bergabung dengan Volkraadd pada tahun 1921–1924;
2. Menjabat sebagai wakil ketua Sarekat Islam pada tahun 1921–1922
3. Mendirikan organisasi Jong Islamitien Bond pada tahun 1925.
4. Bergabung dengan sembilan panitia BPUPKI yang ikut membentuk fondasi Negara Indonesia. “Jalan seorang pemimpin bukanlah jalan yang mudah, memimpin adalah jalan penderitaan” adalah salah satu ajarannya.”

2. Hj. Rangkayo Rasuna Said

Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Rasuna Said merupakan sosok wanita yang penting, khususnya di bidang politik dan pendidikan. Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, khususnya di bidang pendidikan, menjadi alasan utama aktivisme Rasuna Said. Keluarga wanita asli Minangkabau ini adalah bangsawan. Keluarganya memiliki pengetahuan yang luas tentang pendidikan. Perannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mendirikan Persatuan Umat Islam Indonesia (PERMI)
2. Dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan politik perempuan, didirikanlah sekolah Thawalib di Padang pada tahun 1923.

3. Pada tahun 1937, Menara Poetri, majalah mingguan, diterbitkan.
4. Ia menjadi perempuan pertama di Indonesia yang didakwa melakukan ujaran kebencian karena sering menulis kritik terhadap pemerintahan Hindia Belanda di jurnal yang diterbitkannya.

Rasuna Said berharap perempuan bisa menjadi lebih dari sekedar keterasingan dan keterkurungan konvensional yang diperjuangkan Kartini dengan memperjuangkan hak-haknya. Perempuan Indonesia perlu ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan memikirkan konsep kebangsaan (Nurjanah, 2020).

3. Ki Hajar Dewantara

Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan. Ki Hajar Dewantara sudah mengutamakan pendidikan sejak kecil. Dia menempuh pendidikan di ELS, sekolahnya anak-anak Eropa dan kaum bangsawan, untuk pertama kalinya. Dia melanjutkan studi di STOVIA setelah ELS. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, STOVIA didirikan sebagai sekolah untuk melatih dokter pribumi.

Dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Ki Hajar Dewantara memainkan beberapa peran antara lain:

1. Mendirikan Partij pada tanggal 25 Desember bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan E.F.E. Douwes Dekker
2. Ikut serta dalam kelompok Budi Utomo yang masih muda
3. Tulisannya "*Als ik een Nederlander was*" (Seandainya Aku Orang Belanda) menjadi wahana kritik terhadap pemerintah Hindia Belanda.
4. Mendirikan Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1912

Dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, para pemimpin nasional berpartisipasi aktif dalam kapasitas tersebut.

Ada yang berpendapat bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa VOC, ketika masih berupa kongsi (perusahaan) dagang, tidak dapat dipisahkan dari tujuan dan kepentingan bisnis dari abad ke-17 sampai ke-18 M, sistem pendidikan di Indonesia harus diawasi dan dikendalikan secara ketat oleh VOC, berbeda dengan di Belanda yang organisasi keagamaan diperbolehkan secara bebas menjalankan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, mereka berstatus pegawai VOC yang memperoleh nilai pangkat dan gaji, meskipun organisasi keagamaan (gereja) tetap memberikan pendidikan. Hal ini menunjukkan betapa religiusnya (Kristen Protestan) sistem pendidikan pada saat itu. Secara garis besar sistem pendidikan pada masa VOC digambarkan sebagai berikut:

1. Pembelajaran Dasar
2. Sekolah Latin
3. *Seminarium Theologicum* (Sekolah Seminari)
4. *Akademi Pelayanan* (Academie der Marine)
5. Institusi Pendidikan Tiongkok
6. Petunjuk dalam Islam

Melalui lembaga tersebut yang secara historis tumbuh serta memantapkan diri dari Islam pertama kali masuk ke Indonesia, pendidikan bagi penduduk Muslim relatif lebih mapan. Ia dikelola tanpa campur tangan VOC. Pendidikan mulai mendapat penekanan yang lebih maju pada masa ini. Berikut ini adalah beberapa prinsip yang mendasari pemerintah Belanda dalam membangun kebijakannya:

1. Tetap tidak memihak atau menghindari keberpihakan pada salah satu agama;
2. Mempertimbangkan keharmonisan lingkungan sehingga pelajar dapat mendukung kepentingan kolonial dengan menjadi mandiri atau mencari nafkah;
3. Sistem pendidikan diatur oleh perbedaan kelas sosial ekonomi
4. Pendidikan dievaluasi serta difokuskan untuk menciptakan elit sosial yang bisa digunakan untuk menegakkan dominasi politik dan ekonomi pemerintah colonial (Syakur & Yusuf, 2020).

Dengan demikian, muncullah kebijakan balas dendam Belanda terhadap Indonesia yang dikenal dengan politik ETIS pada tahun 1901. Van Deventer, penulis Trilogi Van Deventer, adalah penggagas politik ini. Pendidikan, imigrasi (pergerakan masyarakat), dan irigasi adalah tiga kategori utama politik ETIS. Pendidikan akan menjadi topik diskusi (Syakur & Yusuf, 2020).

Pada masa penjajahan Belanda, terdiri atas dua saluran, yaitu Sekolah Anak Eropa dan Anak Pribumi (Rangga Galih, 2017).

Lulusan program AMS dan HBS mempunyai pilihan sebagai berikut:

1. Bertugas di militer, pemerintahan, atau sektor swasta
2. Mengejar pendidikan di Hindia Belanda
3. Melanjutkan studi di Belanda (Syakur & Yusuf, 2020).

Perkembangan pendidikan dan kemandirian Indonesia sangat dipengaruhi oleh ketiga tokoh tersebut.

Periode Pendidikan Islam di Indonesia (1899-1930)

Pendirian pesantren yang dilakukan K.H. Hasyim Asy'ari menyoroti evolusi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Didirikan pada tahun 1900, pesantren ini menggunakan sistem pembelajaran non klasikal yang dikenal dengan istilah halaqoh. Pendiri pesantren ini adalah lulusan Mekkah. Ada dua tujuan pembaharuan sistem modernisasi tokoh ini. Tujuan utamanya adalah melakukan ibadah haji sesuai dengan hukum Islam. Kedua, lelaki tersebut kembali ke kampung halamannya untuk menyampaikan apa yang telah dipelajarinya setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun di sana untuk melanjutkan pendidikan agamanya setelah menunaikan ibadah haji. Namun pada tahun 1913, Syaik Mustafa Husein mendirikan Pondok Pesantren Al-Mushatafiyah Purba Baru di Tapanuli Selatan. Sorogan, dimana guru membaca buku sambil menjelaskannya, masih menjadi metode pengajaran yang digunakan pada saat itu. Karena belajar adalah tentang memperoleh pengetahuan secara sungguh-sungguh, maka evaluasi tidak mengikat secara hukum (Aslan, 2018).

Berdasarkan sejarah awal kurikulum sejak tahun 1900, pengajaran agama terus menjadi sumber pengetahuan utama bagi siswa. Karena guru dan siswa masih saling menghormati satu sama lain, maka nilai rasa kebersamaan tetap lestari.

Seiring dengan pergeseran masyarakat, struktur topik kurikulum juga berkembang tanpa disadari. Fiqh, aqidah, akhlak, dan pendidikan merupakan salah satu tema yang dibahas dalam kelas bahasa Arab pada tahun 1930. Masjid dan madrasah berfungsi sebagai lembaga pendidikan pada masa itu. Selain itu, sistem ini menggunakan periodisasi, yang umumnya dikenal sebagai sistem tahun masuk, dan bukan kenaikan kelas (Aslan, 2018). Keberadaan sistem pendidikan ini telah melahirkan banyak sekali sarjana. Menurut penulis, kurikulum 1930 sangat sukses karena anak-anak mempunyai budi pekerti yang sangat baik, hal ini tidak hanya terlihat dari program kurikulum tetapi juga dari kurikulum yang tersembunyi..

Pendidikan Islam di Indonesia (tahun 1931-1945)

Reformasi pendidikan Islam di Indonesia tahun 1931 sebagian besar didorong oleh lulusan didikan Mekah yang memperkenalkan konsep pedagogi inovatif. Cara berpikir seperti ini berdampak baik pada sekolah. Hal ini ditunjukkan oleh lembaga pendidikan kontemporer seperti Kulliah Mu'allimin Islamiyah karya Mahmud Yunus. Tariqah al-Mubasyirah digunakan dalam sistem pembelajaran dalam pembaruan ini untuk mengajarkan bahasa Arab dengan menggunakan berbagai teknik. Keberhasilan mahasiswa diukur melalui evaluasi sejak tahun 1931. Selain lulusan Mekkah, pemerintah kolonial Belanda juga berperan penting dalam modernisasi (Aslan, 2018).

Karakteristik Pendidikan Islam di Masa Kolonial

1. Berbasis Pesantren Tradisional
Pesantren menjadi pusat utama pendidikan Islam. Pendidikan di pesantren menggunakan metode tradisional, seperti sistem sorogan (individual) dan bandongan (kolektif), dengan fokus pada pengajaran kitab kuning. Pesantren juga menanamkan nilai-nilai keislaman, moral, dan keberanian melawan ketidakadilan
2. Tidak Terintegrasi dengan Sistem Kolonial
Pendidikan Islam cenderung berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah kolonial. Sistem

pendidikan kolonial lebih berorientasi pada pengajaran sekuler untuk memenuhi kebutuhan administratif Belanda, tanpa memasukkan nilai-nilai agama Islam

3. Keterbatasan Akses ke Ilmu Pengetahuan Modern
Pesantren lebih berfokus pada ilmu-ilmu agama dibandingkan ilmu pengetahuan umum. Hal ini membuat lulusan pesantren kurang memiliki akses terhadap peluang karier di sistem kolonial, yang membutuhkan tenaga kerja dengan pendidikan sekuler.

Dinamika Modernisasi

Organisasi seperti Muhammadiyah dan Persis mulai memperkenalkan pendidikan Islam modern dengan mengintegrasikan kurikulum agama dan ilmu umum. Sekolah-sekolah yang mereka dirikan menggunakan metode pengajaran yang lebih sistematis, berbeda dengan pola pendidikan tradisional.

4. Peran Sebagai Media Perlawanan Budaya
Pendidikan Islam menjadi alat perlawanan terhadap penjajahan, baik melalui pembinaan moral maupun pembentukan kesadaran politik. Pesantren sering menjadi tempat lahirnya tokoh-tokoh nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia

5. Konflik Internal

Terjadi perbedaan pandangan antara kelompok tradisional dan modernis mengenai arah pendidikan Islam. Kelompok tradisional cenderung mempertahankan sistem pesantren klasik, sementara kelompok modernis mendorong adopsi metode pendidikan Barat.

Ciri-ciri ini menggambarkan bahwa pendidikan Islam pada masa kolonial berfungsi tidak hanya sebagai sarana pembelajaran agama, tetapi juga sebagai media untuk menjaga identitas dan merespons tantangan kolonialisme.

Berikut ciri khas pendidikan umum pada zaman Belanda selain pendidikan Islam yang disebutkan di atas:

1. Menciptakan keberagaman untuk melestarikan perbedaan sosial
2. Pendidikan sengaja dibuat agar memiliki pengaruh negatif paling kecil terhadap penutur asli.
3. Kompleksitas birokrasi mempersulit pelaksanaan perbaikan di bidang pendidikan.
4. Harus ada fokus barat di setiap sekolah;
5. Tidak ada kurikulum formal.
5. Tujuan pendidikan adalah untuk menyediakan pekerja. (Syakur & Yusuf, 2020).

Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia

1. Pesantren

Istilah “pesantren” sudah menjadi hal yang lumrah sejak saat itu. Seorang Kyai pernah mengepalai pesantren, dan jumlah santrinya bergantung pada reputasi pesantren tersebut. Periksa banyaknya murid yang terdaftar di pesantren untuk mengukur tingkat minat terhadapnya.

Masjid, kediaman Kyai, dan asrama pesantren merupakan sebagian besar bangunan yang menampung lembaga-lembaga tersebut. Saat ini pesantren sering disebut dengan istilah pedepokan. Sistem pembelajaran belum diterapkan sejak pesantren pertama kali didirikan di Indonesia; yang penting santrinya tetap tinggal di pesantren dan mampu menghidupi dirinya sendiri. Selain itu, santri dan pihak panti tidak terikat perjanjian apapun, sehingga bebas keluar kapan saja tanpa adanya aturan ketat dari pihak pondok pesantren. Untuk menuntut ilmu dan memperoleh ilmu yang berbeda-beda di pesantren mana pun, tergantung santrinya, cukuplah mendatangi Kyai untuk meminta izin keluar dari pesantren tersebut. Selain itu, santri diperbolehkan menikah saat masih bersekolah di pesantren (Aslan, 2018).

Pesantren juga merupakan praktek memberikan pelajaran kepada orang yang memiliki kemauan untuk belajar. Pesantren didirikan di Indonesia dengan tujuan mengajarkan Islam ortodoks, atau kitab kuning. Pondok pesantren pertama kali didirikan di Pulau Jawa dan Semenanjung Malaka (Aslan, 2018).

“Kehadiran kyai sebagai guru, keberadaan santri sebagai santri, keberadaan masjid sebagai sarana belajar, dan adanya penginapan bagi santri” merupakan atribut-atribut yang menandai sebuah pesantren (Alwi, 2019). Sejak didirikan di Indonesia, pesantren

digambarkan tidak mengikat, artinya santri mempunyai kebebasan yang besar. Namun kesadaran santri sendirilah yang menentukan seberapa baik mereka belajar di pesantren. Menurut penulis, pesantren telah mewarnai pendidikan Indonesia dan memunculkan ide-ide kontemporer sejak didirikan. Kalaupun diberikan kebebasan oleh pihak pesantren, namun para santri dalam hal ini sangat disiplin dalam mencari informasi karena memang mereka mau belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kebebasan tersebut dapat melahirkan santri yang memiliki kesadaran diri yang tinggi.

2. Tradisi Keilmuan

Pengajaran Al-Qur'an merupakan kelanjutan dari warisan keilmuan di pesantren. Tradisi ini ditunjukkan dengan seorang guru yang kadang disebut Kyai mengharapkan siswanya mampu menghafal Al-Qur'an dengan fasih sebelum menjelaskan topik hafalan yang dipelajarinya. Kyai telah menunjuk Ustadz untuk membantu menawarkan sistem pembelajaran ini kepada sejumlah besar santri. Karena kurangnya buku dan lemahnya disiplin siswa, pendekatan pembelajaran dorong menghadapi banyak tantangan, sehingga keberhasilan siswa pada akhirnya bergantung pada tantangan tersebut (Amir, 2020).

Pada awalnya para santri di pesantren diajarkan dengan pendekatan dorong pertama yang dianggap menantang sehingga harus banyak bersabar. Siswa akan melanjutkan ke tahap kedua yaitu penerapan metode bandongan jika sudah menguasai tahap pertama. "Ilmu fiqih, ushuluddin serta tafsir Al-Qur'an" semuanya tercakup dalam kuliah tingkat tinggi ini yaitu pendekatan Bandongan. Setelah menguasai pelajaran ini, siswa dapat melanjutkan mata pelajaran tambahan seperti astronomi, berhitung, atau tasawuf. Dengan pendekatan ini, Kyai membacakan teks baris demi baris kemudian menjelaskannya dengan metodologi halaqah. Para santri ini bertanggung jawab atas kemajuan akademis mereka sendiri di pesantren.

Cara sorogan/bandongan yang dilakukan di pesantren, menurut Mahmud Junus, hanya mampu membentuk "satu persen santri yang pandai dan sebagian besar lainnya hanya pandai membeli minyak atau keperluan dapur dengan harga murah" (Kamal, 2020). Namun Steenbrik membantah pernyataan ini. Steenbrik mengklaim jika dilakukan penelitian lebih lanjut, pesantren banyak menghasilkan dampak keagamaan yang dapat mempengaruhi keyakinan agama santri.

Pengajaran kitab kuning tidak terlepas dari warisan keilmuan yang masih diamalkan di pesantren hingga saat ini. Kitab yang ditulis dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa, Sunda, atau bahasa daerah lainnya tanpa menggunakan harakat atau syakal dikenal dengan sebutan kitab kuning. Nama umum lainnya untuk buku ini adalah "buku botak". "Ilmu syariat, sastra adab, bahasa, pengetahuan umum, sejarah, matematika, metafisika, filsafat, tasawuf, dan berbagai bidang keilmuan ulama klasik" termasuk topik yang dibahas dalam kitab kuning ini (Taufiqurrahman & AL Amin, 2021).

3. Surau

Istilah "tempat ibadah" menggambarkan Surau. Surau, sebaliknya, dulunya merupakan bangunan sederhana yang dibangun oleh masyarakat untuk menghormati leluhur mereka. Puncak "bukit atau daerah yang lebih tinggi" secara historis menjadi lokasi Surau. Kehadiran Islam menyebabkan makna surau berubah menjadi "masjid mini" yang digunakan untuk beribadah. Intinya, Surau merupakan lokasi kajian Islam. (Vajra et al., 2021).

Tidak ada kelas atau tingkatan dalam sistem pembelajaran untuk kurikulum Surau. Lembaga ini menggunakan "ceramah, bacaan dan hafalan yang biasanya berpusat pada halaqah" sebagai tekniknya (Hasnida, 2017). Masa kejayaan Surau terjadi pada abad ke-20. Sistem pendidikan khas yang diterapkan ketika Belanda dan madrasah didirikan oleh kelompok Islam modernis menunjukkan pencapaian tersebut.

4. Madrasah

Madrasah diperkirakan mulai bermunculan di Indonesia pada pergantian abad ke-20 sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan Islam saat ini dan upaya untuk mengubahnya (Adelia & Mitra, 2021). Selain itu, penduduk Muslim di Indonesia

merespons kebijakan pendidikan Belanda melalui madrasah. Meskipun kondisi sosial-politik mereka saat lahir terbatas, madrasah terus memainkan peran aktif dalam pendidikan Indonesia saat ini. Kenyataan ini tidak terjadi begitu saja; madrasah selalu berupaya untuk menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan yang ada saat ini. Di Indonesia, madrasah mengalami beberapa dinamika sejak berdirinya hingga akhir abad ke-20. Karena dinamika inilah madrasah berkembang menjadi lembaga pendidikan seperti sekarang ini (Maghfuri & Rasmuin, 2019), Namun secara umum, dinamika yang dialami sekolah, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan dan perubahan kurikulum, dapat dibagi menjadi tiga periode: periode kemunculan sebelum kemerdekaan, periode pasca kemerdekaan, dan periode setelah tiga keputusan menteri. Periode waktu ini menggambarkan perluasan, kemajuan, dan penguatan madrasah dalam sistem pendidikan Indonesia (Aslan, 2016). Madrasah menganut sistem klasikal, sedangkan pesantren menganut sistem sorogan dan halaqah. Inilah perbedaannya satu sama lain. Selain itu, kedua institusi tersebut menggunakan bahan ajar yang berbeda. Madrasah mendidik ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama, sedangkan pesantren terutama mengajarkan ilmu-ilmu agama.

5. Sekolah

Sistem pendidikan bangsa kolonial Belanda yang saat itu bersifat “sekuralistik” yakni meminimalkan jumlah muatan ajaran agama di lembaga pendidikan membuka sistem persekolahan di Indonesia. Fokus utama perkuliahan adalah pada pendidikan umum, yang sangat berbeda dengan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Perbedaan terbesar antara pesantren dan madrasah adalah: meskipun beberapa madrasah mengikuti kurikulum standar, nama mereka tetap sama, yang jelas merupakan penipuan publik. Istilah latin “scola, scolae atau skhola yang mempunyai arti waktu senggang atau waktu luang” mengacu pada sekolah yang dijalankan oleh guru dan berfungsi sebagai lembaga untuk mengisi waktu luang untuk pendidikan. Siswa dan sekolah mempunyai hubungan yang erat. Siswa pada tingkat sekolah menengah pertama dan atas disebut sebagai “siswa” dalam Wikipedia bahasa Indonesia. Ada 87 siswa di “tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar” pada waktu yang bersamaan. Memahami kehidupan masyarakat dan menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari merupakan tujuan pendidikan di sekolah yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu-ilmu sosial. Simbol-simbol yang diperoleh anak-anak di sekolah adalah “kekerasan simbolik yang sah” karena simbol-simbol tersebut terkait erat dengan gambaran yang tertanam dalam pengalaman mereka terhadap manusia, sejarah, dan masyarakat. Hal ini disebut sebagai kekerasan simbolik karena semua lembaga pendidikan terkait erat dengan kerangka peraturan yang ketat yaitu budaya sekolah. Siswa yang melakukan perilaku tidak etis di sekolah akan mendapat konsekuensi atau hukuman dari sekolah sesuai dengan peraturan yang dibuat bersama (Aslan, 2016).

Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia

Tajdid adalah istilah Arab untuk gerakan pembaharuan Islam. Pelakunya sebagai *mujaddid*. Umat Islam terus mendasarkan tanggapan mereka pada “kitab dan sunnah” meskipun reformasi ini pada awalnya disebabkan oleh isu-isu lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, “Sesungguhnya Allah pada awal setiap abad akan mengirimkan kepada umat ini (Islam) orang-orang yang memperbaiki dan memperbaharui agamanya” (HR. Abu Daud). Konsep baru yang dikenal sebagai “reformasi, pemurnian, modernisme dan sebagainya” telah menggantikan pembaharuan *tajdid* yang berumur pendek. Kata “reformasi” dalam bahasa Arab merujuk pada gerakan reformasi Islam. Sebaliknya, ini menyinggung tentang buruh dalam konteks Islam kontemporer. Selain itu, kata ini mengandung arti bangun, melawan penyimpangan, dan rujuk kembali (Aslan, 2018).

“Pemikiran, arus, gerakan dan upaya mengubah paham lama, adat istiadat, institusi dan sebagainya” semuanya merupakan bagian dari modernisasi. Modifikasi tersebut dilandasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kehidupan manusia (Aslan, 2018). Dalam hal pendidikan, modernisasi adalah cara berpikir baru yang beradaptasi dengan perubahan masyarakat.

Asal muasal gerakan modernis ini dapat ditemukan pada abad ke-19. Sejak abad ke-18,

ketika Islam muncul sebagai representasi dari melemahnya kekuatan politik, telah terjadi pergulatan antara Islam dan modernitas. Pola pembaharuan Islam menggantikan kelompok yang fokus pada nasionalisme, sumber-sumber Islam murni, dan model pendidikan barat (Aslan, 2018).

Penjajah Belanda membawa modernisme ke dalam pendidikan Islam Indonesia pada abad ke-19. “*Volkshoolen*, sekolah rakyat, atau sekolah desa (Nagari) dengan masa pembelajaran tiga tahun” termasuk di antara lembaga-lembaga tersebut (Prayudi & Salindri, 2015). perubahan dari lembaga Surau menjadi sekolah Nagari Model Belanda Minangkabau.

Ide-ide baru yang disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itulah yang menjadi penyempurnaan. Kaum modernis Muslim mengembangkan sistem pendidikan Islam pada abad ke-20 sebagai respons terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh kelompok Kristen dan kolonialisme. Kurikulum lama yang mendorong siswa untuk belajar bahasa Inggris juga diubah dengan modifikasi ini. Kegiatan lainnya antara lain belajar bahasa Arab dan mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti atletik, seni, dan lain sebagainya. Contohnya adalah Pondok Pesantren Modern Gontor di Ponorogo dan Pondok Pesantren Mambahul Ulum di Surakarta. Sementara itu, sistem juga mengalami penyesuaian.

Awalnya dilakukan di surau tanpa kelas dan tanpa peralatan, baik bangku, meja, papan tulis, hanya penonton saja. Sejak itu, secara bertahap mengalami perubahan. Sekolah Adabiah di Padang merupakan sekolah Islam pertama yang menggunakan ruang kelas dengan bangku, meja, dan papan tulis (Aslan, 2018).

Syekh Abdullah Ahmad mendirikan sekolah ini pada tahun 1909. Sekolah ini dianggap sebagai komunitas pada tahun 1914, namun pada tahun 1915 mengalami transformasi menjadi H.I.S. Adabiah. Adabiah telah berkembang menjadi Sekolah Rakyat dan Sekolah Menengah pada saat ini.

Sistem Pendidikan Islam Pada Masa Kolonialisme Belanda

Pendidikan Islam disebut juga bumiputera pada masa penjajahan Belanda karena seluruh peserta didiknya adalah penduduk asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat tiga macam bentuk pendidikan Islam, yaitu: Pertama, metode persekolahan peralihan antara Islam dan Hindu. Sistem pendidikan ini masih memasukkan unsur sekolah Islam dan Hindu. Secara umum, ada dua sistem yang digunakan dalam pendidikan: (1) sistem Istana dan (2) sistem Asketis. Guru mengunjungi siswanya untuk menerapkan pendekatan pendidikan kerajaan ini. Murid-muridnya adalah keturunan bangsawan dan bangsawan. Sebaliknya, dalam sistem pertapaan, siswa mengunjungi guru di pertapaannya. Sementara itu, murid-muridnya tidak lagi hanya anggota kalangan bangsawan dan istana; mereka juga termasuk.

Yang kedua adalah sistem pendidikan surau (langgar). Kata “surau” digunakan secara luas di seluruh Asia Tenggara, termasuk Sumatera Selatan, Semenanjung Malaya, dan Patani (Thailand). Sebaliknya masyarakat Minangkabau paling banyak memanfaatkannya. Surau berarti “tempat” atau “tempat ibadah” dalam ilmu linguistik. Definisi asli surau adalah bangunan sederhana yang digunakan untuk menghormati arwah kerabat. Beberapa ulama berpendapat bahwa Surau adalah lembaga India yang berfungsi sebagai pusat pendidikan Hindu-Buddha. Ketika Islam masuk ke Minangkabau, Syekh Burhanudin yang merupakan pengemban agama tersebut memulai proses pendidikan Islam dengan menyebarkan ajarannya melalui Lembaga Pendidikan Surau. Karena sebagian besar penghuni surau ini adalah laki-laki, maka Syekh mungkin lebih mudah menyebarkan ajarannya. Berbeda dengan lembaga pendidikan modern, lembaga pendidikan Surau tidak memiliki birokrasi apapun. Hubungan antar orang-orang yang terlibat berdampak besar terhadap peraturan yang tertulis di dalamnya. Jelas terlihat bahwa kebebasan tercipta di lembaga pendidikan Surau ketika siswa yang tidak menaati aturan yang disepakati bersama diberi bimbingan dan bukan hukuman. Alih-alih hanya fokus pada perolehan ilmu, lembaga Surau mengajarkan sosialisasi dan interaksi budaya. Dengan demikian, jelas bahwa peran masyarakat pembelajar di Surau sangat besar.

Murid-murid (Urang Siak) diperbolehkan belajar pada kelompok mana saja yang mereka kehendaki karena sistem pendidikan Surau tidak mengenal jenjang atau jenjang kelas. Sebaliknya, siswa dibedakan berdasarkan tingkat pengetahuannya, dan proses pembelajarannya tidak ketat. Kitab kuning merupakan sumber belajar utama yang digunakan siswa selama proses

pembelajaran; baik meja maupun papan tulis tidak digunakan.. Di surau, ceramah, membaca, dan menghafal adalah modalitas pengajaran yang utama. Urang Siak menyelesaikan materi pembelajaran yang diberikan Syekh sambil duduk setengah lingkaran di lantai. Saat siswa mendengarkan Syekh membacakan pelajaran, mereka dapat mencatat poin-poin penting di samping buku yang sedang dibahasnya atau menggunakan buku khusus yang telah disiapkan siswa. Halaqoh adalah nama yang diberikan untuk sistem jenis ini (Ramayulis, 2011).

Ketiga, sistem pendidikan pesantren. Secara umum terdapat dua aliran pemikiran yang mengedepankan cara pandangnya terhadap sejarah pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Pertama, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berakar pada adat istiadat Islam. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa pesantren atau zawiyat berasal dari cara hidup sufi dan menyebar ke seluruh wilayah Islam termasuk Timur Tengah dan Afrika Utara. Kedua, tradisi Hindu-Budha yang telah diislamkan dijalankan oleh pesantren. Mereka memperhatikan adanya kaitan antara kata Sanskerta Shastri dan kata pesantren. Sekolah tertua di Indonesia bernama Pesantren. Setelah mengalami proses Islamisasi dalam perkembangannya, pesantren kini menjadi milik umat Islam.

Metode pengajaran pesantren yang pertama adalah Metode Sorogan (Pelayanan Perorangan), yaitu melibatkan seorang ustadz yang hanya berinteraksi dengan satu atau sejumlah kecil santri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Prosesnya antara lain siswa memegang kitab di depan kiyai, mendengarkan kiyai membacakan bagian-bagian kitab tersebut, kemudian mengulangi bacaan tersebut hingga siswa menguasainya. Siswa dapat menguasai kembali materi baru jika sudah menguasai materi lama (Robi'ah et al., 2024). Kedua yaitu pendekatan Wetonan dan Bandongan (Pengabdian Kolektif) merupakan strategi pengajaran yang berbasis ceramah. Pada saat-saat tertentu, seperti saat salat Isya atau Subuh berjamaah, ustadz membacakan kitab tersebut di depan sejumlah besar siswa tingkat lanjut. Teknik ini lebih sering dikenal dengan kata Bendongan di wilayah Jawa Barat. Pendekatan ini biasanya melibatkan Kiyai membaca, menerjemahkan, dan kemudian menjelaskan bagian-bagian yang menantang dari sebuah buku sementara siswa mendengarkan dan mencatat di pinggir buku. Pendekatan ini dikenal dengan istilah "halaqoh" di Jawa, yaitu siswa mengelilingi pengajar saat berdebat mengenai kitab tersebut (Aris & Syukron, 2020). Ketiga adalah teknik musyawarah meliputi pembelajaran melalui diskusi ala seminar untuk menjawab segala permasalahan yang berkaitan dengan materi pembelajaran siswa tingkat lanjut. Dengan mengharuskan siswa untuk secara aktif mempelajari teks-teks yang dipilih oleh kiyai mereka, pendekatan ini sangat menekankan pada partisipasi siswa. Pendeta harus mematuhi dan memberikan arahan sesuai kebutuhan (Tambak, 2015).

KESIMPULAN

Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda di Indonesia merupakan periode yang penuh tantangan dan dinamika. Kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh pemerintah kolonial tidak hanya membatasi akses umat Islam terhadap pendidikan formal, tetapi juga berusaha mengarahkan pendidikan untuk memenuhi kepentingan administrasi kolonial. Dalam konteks ini, pesantren muncul sebagai lembaga pendidikan yang sangat penting. Meskipun sering dianggap terbelakang dan tidak relevan oleh pemerintah kolonial, pesantren tetap berfungsi sebagai benteng identitas keislaman dan sebagai pusat pengkaderan tokoh-tokoh pergerakan nasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berperan sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media perlawanan terhadap penjajahan dan peneguhan identitas keislaman. Tokoh-tokoh pendidikan Islam, seperti KH Agus Salim, Hj. Rangkyo Rasuna Said, dan Ki Hajar Dewantara, memberikan kontribusi besar dalam mempertahankan dan memodernisasi pendidikan Islam di tengah tantangan kolonial. Meskipun terdapat konflik antara kelompok tradisional dan modernis, dinamika ini justru memperkaya perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan, kita bisa melihat bagaimana perjuangan dan strategi yang digunakan oleh ulama dan tokoh-tokoh Islam dalam mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya. Hal ini menjadi penting dalam konteks pendidikan Islam saat ini, yang masih menghadapi tantangan modernisasi,

globalisasi, dan sekularisasi.

REFERENSI

- Abrisal, Rama, B., & Dirmawati. (2024). Departemen agama dan pengembangan pendidikan islam pada awal kemerdekaan. *El-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 83–92.
- Adelia, I., & Mitra, O. (2021). Permasalahan Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan Madrasah. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 32–45. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.832>
- Afandi, A. N., Swastika, A. I., & Evendi, E. Y. (2020). Pendidikan Pada Masa Pemerintah Kolonial. *Jurnal Artefak*, 7(1), 21–30.
- Aiwan, A., & Rehani. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam Di Nusantara Sebelum Kemerdekaan: Kasus Kebijakan Politik Kolonial Jepang Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(1980), 1349–1358.
- Alwi, M. B. (2019). PONDOK PESANTREN: Ciri Khas, Perkembangan, dan Sistem Pendidikannya. *Mau'izhah*, 9(2), 205–219. <https://doi.org/10.55936/mauizhah.v9i2.26>
- Amin, M. (2019). Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda Dan Jepang. *Jurnal Pilar : Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 10(2), 1–11.
- Amir, S. (2020). Problematika Pembelajaran Kitab Kuning Di Pesantren Putra Alkhairaat Pusat Palu. *Al-Qalam*, 26(1), 141. <https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.827>
- Aris, & Syukron. (2020). Perbandingan Metode Bandongan Dan Sorogan Dalam Memahami Kitab Safinatunnajah. *Tsaqafatuna*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v2i1.37>
- Aslan. (2016). Kurikulum Pendidikan Vs Kurikulum Simetrom. *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 14(2), 4 dan 167.
- Aslan, A. (2018). Dinamika Pendidikan Islam di Zaman Penjajahan Belanda. *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, 6(1), 39–50. <https://doi.org/10.21093/sy.v6i1.1024>
- Eva Tri Cahyanti. (2021). Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(2), 181–197. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v2i2.47>
- Fikriyan, F., Huda, F., & Rahmawati, A. (2023). Sejarah Lahirnya Peradaban Pendidikan Islam dan Relevansinya terhadap Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *JASNA: Journal of Aswaja Studies*, 3(2), 136–149.
- Fitriani, Rama, B., & Rusmin, M. (2024). Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang. *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(10), 775–780.
- Hasan, M., Hasan, S., Anita, A., Yasir, A., & Basirun, B. (2023). Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam Di Indonesia Zaman Pra Kemerdekaan Masa Kolonial Belanda Dan Jepang. *Al Wildan: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(3), 126–136. <https://doi.org/10.57146/alwildan.v1i3.711>
- Hasnida, H. (2017). Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme Dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, Sekutu). *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), 237–256. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i2.6442>
- Ilham, Bahaking Rama, & Muhammad Rusydi Rasyid. (2023). Pendidikan Islam di Indonesia Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang. *PIJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(1), 102–109. <https://doi.org/10.58540/pijar.v1i1.139>
- Kamal, F. (2020). Model Pembelajaran Sorogan Dan Bandongan. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 15–26. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i2.1572>
- M.Rasyid, Kasful Anwar US, & Sya'roni Sya'roni. (2024). Peran dan Pengaruh Pendidikan Islam pada Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Serta Tokoh-Tokohnya. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(5), 276–283. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.560>
- Maghfuri, A., & Rasmuin. (2019). Dinamika Kurikulum Madrasah Berbasis Pesantren Pada Abad

- Ke 20 (Analisis Historis Implementasi Kurikulum Madrasah). *A Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3(1), 1-16.
- Maliki, N. (2023a). Pendidikan Multikultural di Sekolah Umum Berbasis Kampung Santri: Studi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Arjawinangun Cirebon. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 271–290.
- Maliki, N. (2023b). *Pesantren di Era Disrupsi* (Supriyadi (ed.); I). Maghza.
- Muid, A., Syazwa, M. O. H., & Mizar, A. (2020). Pendidikan islam dizaman penjajahan jepang. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam*, 13(13), 20–28.
- Nasution, R. P. (2022). Moderasi Beragama: Upaya Mengatasi Pemahaman Konservatif pada Masyarakat Muslim di Indonesia. *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 10(2), 53–70. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14675>
- Nizar, S. (2005). *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam*. Quantum Teaching.
- Nurjanah, E. (2020). PERAN HAJJAH RANGKAYO RASUNA SAID DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEREMPUAN INDONESIA. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Prayudi, G. M., & Salindri, D. (2015). Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di Surabaya Tahun 1901-1942 (Education on Dutch Government in Surabaya At 1901-1942). *Publika Budaya*, 3(1), 20–34.
- Rahman, D., & Akbar, A. R. (2021). Problematika Yang Dihadapi Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Tantangan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Nazzama: Journal of Management Education*, 1(1), 76. <https://doi.org/10.24252/jme.v1i1.25242>
- Ramayulis. (2011). *Sejarah Pendidikan Islam*. Kalam Mulia.
- Rangga Galih, D. (2017). PENERAPAN POLITIK ETIS DI SURABAYA TAHUN 1911-1930. *Journal Pendidikan Sejarah*, 5(3), 751–765.
- Robi'ah, A., Safitriani, D. S., Tasya, W. N., & Apriata, W. (2024). Peluang Dan Tantangan Kurikulum Masa Penjajahan Belanda Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 2(1), 82–90.
- Rohani, R., Ernita, M., & Salmiah, S. (2022). PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA (Kasus Muhammadiyah Dan NU). *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 18(2), 103. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v18i2.21483>
- Salsabila, S. S., Ichsan, Y., Rohmadani, A. I., & Mahmudah, S. R. (2021). Implikasi Pendidikan Islam di Indonesia pada Zaman Orde Lama, Baru, dan Reformasi. *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 8–15. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i2.1753>
- Septiani, S. (2021). *PENOLAKAN PERMI TERHADAP ORDONANSI SEKOLAH LIAR TAHUN 1932-1933*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Slamet Untung, M. (2013). Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren. *Forum Tarbiyah*, 11(9), 1–13.
- Sultani, Z. I. M., & Kristanti, Y. P. (2020). Perkembangan Dan Pelaksanaan Pendidikan Di Zaman Kolonial Belanda Di Indonesia Abad 19-20. *Jurnal Artefak*, 7(2), 91. <https://doi.org/10.25157/ja.v7i2.3518>
- Sumarno, Sumarno, Aji, R., & Hermawan, E. (2019). *Ethical Politics and Educated Elites In Indonesian National Movement*. 383(Icss), 369–373. <https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.170>
- Susmihara. (2013). Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda Dan Jepang. *Jurnal Rihlah*, 1(1), 1–23.
- Syakur, A., & Yusuf, M. (2020). Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1(1), 37–47. <https://doi.org/10.55623/au.v1i1.5>
- Syarifuddin, N. (2017). Madrasah Sebagai Bentuk Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia. *Al-Ibrah*, 2(2).
- Syarifudin, M. (2021). Resistensi Adat Sasak Dan Agama (Studi Tawaran Resolusi Konflik Dalam Perilaku Keagamaan Muslim Lombok). *Komunitas*, 12(2), 120–131. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v12i2.4410>
- Tambak, S. (2015). Metode Diskusi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 12(1), 1–20. [https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12\(1\).1444](https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12(1).1444)

- Taufiqurrahman, Z. Fajar, & AL Amin, H. (2021). Desain Pembelajaran Literasi Kitab Kuning Melalui Metode Sorogan Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Islam. *Jurnal Imiah Indonesia*, 6(2), 27–38. <https://doi.org/2541-0849>
- Tirolian. (2016). Kolonialisme dan Dikotomi Pendidikan Islam di Indonesia. *Ihya' Al - 'Arabiyah*, 11(1), 1–14.
- Transiska, R. (2021). Kebijakan Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda Dan Respon Umat Islam Di Jambi (Tahun 1915-1942 M). *Thaqafiyat : Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 20(1), 105. <https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20106>
- Vajra, R., Mulyaningsih, E., & Kustanto, L. (2021). Bergesernya Makna Dan Fungsi Surau Dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau Melalui Film Dokumenter “Surau Kito” Dengan Gaya Ekspositori. *Sense: Journal of Film and Television Studies*, 2(2), 83–96. <https://doi.org/10.24821/sense.v2i2.5076>
- Ya'kub, & Rama, B. (2024). Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. *JURNAL PILAR : Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 15(1), 75–93.